

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut Jensen and Meckling (1976). Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan perusahaan untuk memahami *corporate governance*. Jensen and Meckling (1976) dalam Ujijantho dan Pramuka (2007) adalah:

"...a contract relationship which one or more person (the principal) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent. If both parties to the relationship are utility maximizers, there is good reason to believe that the agent will not always act in the best interests of the principal."

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa teori keagenan merupakan suatu

hubungan kontrak antara satu atau lebih pihak (*principals*) terhadap pihak lain

(*agent*) untuk melakukan jasa atas nama mereka (*principal*) yang melibatkan pendelegasian pengambilan keputusan kepada agen.

2. Pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan

Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan ini adalah bukan hanya laporan keuangan saja, tetapi laporan non-keuangan juga akan diungkapkan dalam laporan tahunan. Laporan tahunan ini akan dijadikan dasar oleh para investor (*stakeholders*) dalam pengambilan keputusan investasi. Darrough dalam Na'im dan Rakhman, (2000) mengemukakan bahwa ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu: (1) pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*), (2) pengungkapan sukarela (*Voluntary Disclosure*).

Pengungkapan seharusnya dapat membantu para *stakeholders* dalam pertimbangan pengambilan keputusan dalam perusahaan tersebut, dikarenakan pengungkapan itu saja berarti menyatakan yang sebenarnya atau memaparkan segala apa yang dibutuhkan baik finansial maupun non finansial kepada para *stakeholders* agar sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan dengan melihat laporan tahunan yang telah dibuat oleh manajemen.

Casabona dalam Yuen, *et al* (2010) mencatat bahwa kreditur dan investor global membuat keputusan investasi mereka berdasarkan berbagai informasi keuangan dan non-keuangan yang dipublikasikan, serta *economic reports* yang dikeluarkan oleh perusahaan publik di Indonesia.

Di Indonesia, kebijakan mengenai pengungkapan *corporate governance* diatur oleh BAPPEPAM. BAPPEPAM melalui keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan nomor: KEP-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan yang memuat uraian singkat mengenai penerapan *corporate governance* perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan tahunan terakhir. Peraturan tersebut memuat 16 *point item* yang terdiri dari pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, komite nominasi dan remunerasi, komite manajemen resiko, komite lain yang dimiliki perusahaan, anggota dewan direksi, dan anggota dewan komisaris, akses informasi dan data perusahaan, etika perusahaan, tanggung jawab sosial, pernyataan penerapan *good corporate governance*, dan informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan *good corporate governance*.

Enam belas *point item* tersebut memuat 93 *item* pengungkapan yang digunakan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah mengungkapkan informasi mengenai *corporate governance*. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia 2006 ini diterbitkan dalam kerangka dorongan etika. Pedoman ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat namun merupakan rujukan bagi dunia usaha dalam menerapkan GCG. Pedoman ini menjelaskan langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menciptakan situasi *checks and balance*, menegakkan transparansi dan akuntabilitas, serta merealisasikan tanggung jawab sosial untuk kelangsungan hidup perusahaan. Demi kepentingan ini, maka BAPEPAM mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (KNKG,2006) yang mengatur tentang standar-standar pengungkapan *corporate governance* yang sebaiknya diungkapkan oleh perusahaan. Item yang dimaksudnya ini terangkum dalam tabel 2.1

Tabel 2.1 *Item Pengungkapan Corporate Governance*

NO	Klasifikasi	Item Pengungkapan
1	Pemegang Saham	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian mengenai hak pemegang saham. 2. Pernyataan mengenai jaminan perlindungan hak atas pemegang saham perlakuan yang sama terhadap hak pemegang saham. 3. Tanggal pelaksanaan RUPS. 4. Hasil RUPS
2	Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama-nama anggota Dewan Komisaris. 2. Status setiap anggota (komisaris independen atau komisaris bukan independen). 3. Latar belakang pendidikan dan karier Dewan Komisaris . 4. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. 5. Kebijakan dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris. 6. Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri tentang kinerja masing-masing anggota Dewan. 7. Jumlah rapat yang dihadiri. 8. Jumlah kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dalam rapat. 9. Mekanisme pengambilan keputusan. 10. Program pelatihan Dewan Komisaris.
3	Direksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama-nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing. 2. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi. 3. Latar belakang pendidikan dan karier anggota Direksi. 4. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. 5. Mekanisme pengambilan wewenang. 6. Mekanismependelegasian wewenang.

		<ol style="list-style-type: none"> 7. Kebijakan dan jumlah remunerasi anggota Direksi 8. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi 9. Jumlah kehadiran setiap anggota Direksi dalam rapat 10. Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja anggota Direksi 11. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi
4	Komite Audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota Komite Audit. 2. Riwayat hidup singkat setiap anggota Komite Audit. 3. Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit. 4. Jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat. 5. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh Komite Audit. 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit. 7. Independensi anggota Komite Audit. 8. Keberadaan piagam Komite Audit.
5	Komite Nominasi dan Remunerasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi. 2. Riwayat hidup singkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. 3. Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi. 4. Jumlah pertemuan yang dilakukan Komite Nominasi dan Remunerasi. 5. Jumlah kehadiran rapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi. 7. Independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
6	Komite Manajemen Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota Komite Manajemen Risiko. 2. Riwayat hidup singkat setiap anggota Komite Manajemen Risiko. 3. Uraian tugas dan tanggung jawab

		<p>Komite Manajemen Risiko.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko. 5. Jumlah kehadiran dalam setiap rapat. 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Manajemen Risiko. 7. Independensi anggota Komite Manajemen Risiko.
7	Komite Tata Kelola Perusahaan (GCG)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota komite GCG. 2. Riwayat hidup singkat setiap anggota Komite GCG. 3. Uraian tugas dan tanggung jawab Komite GCG. 4. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh Komite GCG. 5. Jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat. 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite GCG. 7. Independensi anggota GCG.
8	Komite-komite lain yang Dimiliki oleh Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota komite. 2. Riwayat hidup singkat setiap anggota komite. 3. Uraian tugas dan tanggung jawab komite. 4. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite. 5. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite. 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite. 7. Independensi anggota komite.
9	Sekretaris Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Sekretaris Perusahaan. 2. Riwayat singkat Sekretaris Perusahaan. 3. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan.
10	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang keberadaan SPI (Satuan Pengawas Internal). 2. Jumlah anggota SPI. 3. Jabatan masing-masing anggota SPI.

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab SPI. 5. Uraian mengenai aktivitas SPI selama setahun. 6. Penjelasan mengenai audit internal perusahaan.
11	Manajemen Risiko Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan. 2. Upaya untuk mengelola risiko-risiko tersebut.
12	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, anggota direksi dan anggota dewan komisaris.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok perkara/gugatan. 2. Posisi kasus. 3. Status penyelesaian perkara/gugatan. 4. Pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan.
13	Akses informasi dan data perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan. 2. Daftar penyebaran informasi ke publik.
14	Etika Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan mengenai budaya perusahaan yang dimiliki perusahaan
15	Pernyataan Penerapan GCG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan prinsip-prinsip GCG. 2. Keberadaan pedoman pelaksanaan GCG dalam perusahaan. 3. Kepatuhan terhadap pedoman GCG. 4. Keberadaan Board Manual. 5. Struktur tata kelola perusahaan. 6. Hasil penerapan GCG selama setahun. 7. Audit GCG (jasa atestasi) oleh eksternal auditor.

16	Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan GCG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi perusahaan. 2. Misi perusahaan. 3. Nilai-nilai perusahaan. 4. Kepemilikan saham oleh anggota Dewan. 5. Komisaris dan Direksi beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya. 6. Uraian mengenai kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan pasar modal. 7. Uraian mengenai transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan. 8. Uraian mengenai etika bisnis dalam perusahaan
----	---	--

Sumber:

1. Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-134/BL/2006
2. Pedoman Umum Corporate Governance (KNKG, 2006).

3. Mekanisme *Corporate Governance*

Corporate Governance adalah susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan *stakeholder*, internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya (FCGI (Forum *Corporate Governance* Indonesia) dalam Alaha, 2009).

Corporate Governance juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran - sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja.

Denis dan McConell dalam Hapsoro, (2003) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat mekanisme baik institutional maupun *market*

keputusan yang memaksimalkan nilai perusahaan kepada pemilik (pemasok modal). Cadbury dalam Wulandari, (2006) mendefinisi *corporate governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Pada umumnya *corporate governance* dipandang sebagai cara yang efektif untuk menggambarkan tentang hak dan tanggung jawab masing-masing kelompok pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) di dalam perusahaan. Manajer merupakan agen dan pemilik merupakan prinsipal. Pemilik perusahaan ingin memperoleh jaminan untuk mendapatkan return atas investasinya, meskipun mereka tidak secara langsung terlibat di dalam pembuatan keputusan dan pengelolaan kegiatan internal perusahaan. Pendekatan konvensional menurut Parkinson (1994) sebagai berikut:

“...the process of supervision and control intended to ensure that the company's management acts in accordance with the interests of shareholders.”

Dari pernyataan Parkinson di atas, digambarkan bahwa *corporate governance* adalah proses supervisi dan pengendalian yang bermaksud untuk memastikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan selaras dengan kepentingan-kepentingan para pemegang saham. Definisi yang diungkapkan oleh Parkinson ini berfokus pada hubungan antara manajemen perusahaan dan para pemegang saham.

4. Prinsip-prinsip *corporate governance*

Dalam pencapaian tujuan jangka panjang, selain merumuskan tentang

beberapa prinsip-prinsip *corporate governance*. OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) mengembangkan lima prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham.
- b. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham asing dan minoritas.
- c. Peranan pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan.
- d. Keterbukaan dan transparansi.
- e. Akuntabilitas dewan komisaris.

Sedangkan di Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), (2006) menetapkan lima prinsip *corporate governance* yang tercantum dalam “Pedoman Umum *Good Corporate Governance*”, yaitu:

a. Transparansi.

Transparansi merupakan penyediaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

b. Akuntabilitas.

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola dengan benar

terukur, dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

c. **Responsibilitas.**

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

d. **Independensi.**

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga setiap organisasi perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak terintervensi oleh pihak lain.

e. **Kewajaran dan kesetaraan.**

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

5. Transparansi

Laporan tahunan merupakan media utama penyampaian informasi oleh manajemen kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan tahunan terdiri atas bagian laporan manajemen, bagian ikhtisar data keuangan, bagian analisis dan pembahasan umum oleh manajemen, serta bagian laporan keuangan. Laporan tahunan mengkomunikasikan informasi kondisi keuangan dan informasi lainnya kepada pemegang saham, kreditor dan *stakeholders* atau calon *stakeholders* lainnya. Laporan tersebut juga menjadi alat utama bagi para manajer untuk

menunjukkan keefektifan pencapaian tugas dan pelaksanaan fungsi

pertanggungjawaban dalam organisasi. Informasi yang diungkap di dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan ke dalam pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela.

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Pengungkapan wajib di Indonesia diatur berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2000 yang berisi Peraturan Bapepam No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan. Pada tanggal 27 Desember 2002, peraturan tersebut disempurnakan melalui Surat Edaran Ketua Bapepam Nomor 02/PM/ 2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam surat edaran tersebut telah diatur tentang pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik untuk 13 (tiga belas) industri.

Pengungkapan wajib di Indonesia selain diatur melalui Surat Edaran Ketua Bapepam Nomor 02/PM/ 2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, juga diatur berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.2 Tahun 1996 tentang Laporan Tahunan. Oleh karena itu, pada penelitian ini pengukuran terhadap tingkat pengungkapan wajib akan dihitung berdasarkan kedua peraturan tersebut di atas.

Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan informasi melebihi yang diwajibkan. Pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lain yang dipandang relevan untuk pembuatan keputusan oleh para pemakai laporan tahunan (Meek *et.al.*, 1995).

Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, pengungkapan sukarela memang

dimungkinkan (Suripto, 1998). Pada penelitian ini, tingkat transparansi diproksikan dengan dua tingkat pengungkapan informasi, yaitu tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib dan tingkat pengungkapan sukarela.

6. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan, terdiri dari komisaris utama, komisaris independen, dan komisaris. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara. Pada teori agensi, dewan komisaris dibutuhkan untuk memonitor dan mengendalikan tindakan manajer karena perilaku oportunistiknya (Jensen dan Mecklin dalam Wulan, 2013).

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance* (KNKG, 2006). Akan tetapi, dewan komisaris tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam mengambil keputusan operasional. Coller dan Gregory dalam Sembiring, (2005) berpendapat bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan manajemen dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif.

7. Independensi Komite Audit

Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit menjunjung tinggi lima prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dan bertindak secara profesional dan independen untuk kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan (BAPEPAM 2006). Komite

audit ini dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab terhadap dewan komisaris dalam memastikan efektivitas dalam sistem pengendalian internal perusahaan dan sistem audit di setiap bagian perusahaan.

8. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan ini yang akan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Menurut McNally *et.al* dalam Muhamad *et al*, (2009), ukuran perusahaan merupakan karakteristik perusahaan yang dominan dalam praktik pengungkapan oleh karena tekanan yang dialami perusahaan baik dari dalam maupun dari luar. Sedangkan Singhvi dan Desai dalam Muhamad *et al*, (2009) mengungkapkan bahwa perusahaan dengan ukuran besar menggunakan informasi-informasi yang ada untuk tujuan manajerial, khususnya untuk pengungkapan internal pengawasan oleh manajemen puncak.

9. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut (Warsono dkk.,2009).

Dalam pengaruhnya terhadap praktik pengungkapan, Muhamad *et al.* (2009) menyatakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas lebih besar dibanding dengan yang lainnya memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi untuk mendukung kelangsungan posisi perusahaan tersebut. Lebih lanjut, Singhvi dan Desai dalam Muhamad *et al.* (2009) dengan menyatakan pendapatan yang lebih besar memotivasi manajemen untuk menyediakan pengungkapan informasi yang lebih luas untuk memberikan jaminan kepada investor. Selain itu, profitabilitas perusahaan yang meningkat juga dapat berasal dari meningkatnya kapasitas perusahaan atau sumber pendanaan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis.

Semakin bertambahnya sumber pendanaan yang didapat dari pemegang saham, kreditur, serta pemangku kepentingan lainnya, maka perusahaan akan semakin mempunyai kesempatan dalam mengembangkan aktivitas perusahaan sehingga perusahaan akan cenderung dapat meningkatkan labanya. Seiring dengan meningkatnya kapasitas atau sumber pendanaan perusahaan, maka jumlah dan ragam pemangku kepentingan akan semakin banyak.

Hal ini mengakibatkan pengungkapan informasi yang mengakomodasi kebutuhan pemangku kepentingan mutlak diperlukan. Pengungkapan informasi ini digunakan sebagai respon tanggung jawab perusahaan atas penggunaan dana pemangku kepentingan. Dalam prakteknya, profitabilitas dapat diukur melalui beberapa rasio, yaitu: *profit margin (profit margin on sales)*, *Return on Assets*

(ROA), *Return on Equity (ROE)*, dan laba per lembar saham. Dalam penelitian ini

profitabilitas diproksikan dengan menggunakan ROE (*Return on Equity*), yang merupakan perbandingan laba setelah pajak dengan total ekuitas.

10. Kepemilikan Dispersi

Haniffa and Cooke dalam Kusumawati, (2007) mengklasifikasikan struktur kepemilikan saham menjadi dua, yaitu kepemilikan terkonsentrasi (*concentrated ownership*) dan kepemilikan dispersi (*dispersed ownership*). Kepemilikan terkonsentrasi adalah kepemilikan mayoritas saham oleh pihak manajerial. Sedangkan menurut Alsaeed dalam Rini, (2010) kepemilikan dispersi diwakili oleh persentase saham yang dimiliki oleh investor individu di luar manajemen selain pemerintah, institusi nasional dan asing, serta kalangan keluarga. Dalam teori agensi, dinyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan dispersi yang tinggi akan melakukan pengungkapan yang tinggi pula. Hal ini terjadi karena dengan adanya kepemilikan dispersi, pemilik akan meminta pengungkapan lebih untuk mengawasi perilaku oportunistik manajemen dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kepemilikan terkonsentrasi.

Na'im dan Rakhman dalam Rini, (2010) mengatakan bahwa jika kepemilikan manajerial semakin besar, maka akan semakin sedikit informasi yang akan diungkapkan dalam laporan tahunan karena manajer memiliki akses yang luas terhadap informasi perusahaan tanpa harus melalui laporan tahunan yang

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang luas pengungkapan *corporate governance* sudah mulai banyak dilakukan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rianto dan Surya (2013), Rini (2010), Petri (2012). Rianto dan Surya, (2013) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perbankan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2008-2011 . Rianto dan Surya (2013) menemukan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kualitas audit atau independensi komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance* sedangkan ukuran dewan komisaris dan kepemilikan dispersi mempengaruhi secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Petri (2012) melakukan penelitian mengenai analisis faktor yang mempengaruhi pengungkapan *corporate governance*, dengan mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebanyak 45 perusahaan pada tahun 2010-2011. Petri (2012) menemukan *leverage* dan ukuran perusahaan berhubungan positif secara signifikan terhadap pengungkapan *corporate governance*, sedangkan independensi komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *corporate governance*.

Rini (2010) melakukan penelitian mengenai analisis luas pengungkapan *corporate governance*, dengan mengambil sampel perusahaan yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007 dan 2008. Jumlah populasi sampai tahun 2008 sebanyak 303 perusahaan. Rini (2010) menemukan ukuran

perusahaan ukuran dewan komisaris tidak mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* secara signifikan.

C. Hipotesis

1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap luas pengungkapan *corporate governance*

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan, terdiri dari komisaris utama, komisaris independen, dan komisaris yang berkedudukan sama termasuk komisaris utama yaitu sebagai dewan komisaris. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa dewan komisaris dibutuhkan untuk memonitor dan mengendalikan tindakan manajemen karena perilaku oportunitasnya. Coller dan Gregory dalam Sembiring, (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan dan mengawasi kinerja manajer secara efektif. Oleh karena itu, pengungkapan yang dilakukan oleh manajemen juga akan semakin besar.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Arifin dalam Sembiring, (2005) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Petri (2013) dan Rianto dkk (2013) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan serta laporan tahunan perbankan yang terdaftar di BEI. Tetapi tidak konsisten dengan penelitian Rini (2010) yang menunjukkan

bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* .

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance* (KNKG, 2006), tetapi dewan komisaris tidak diperbolehkan dalam hal pengambilan keputusan secara operasional tetapi berperan penting dalam mengendalikan kinerja manajer sehingga akan dapat mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance*. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁: ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*

2. Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap luas pengungkapan *corporate governance*

Komite audit merupakan komite yang bertugas membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen. Petri (2012) melakukan penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *corporate governance* pada laporan tahunan. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah independensi komite audit yang diprosikan dengan perbandingan proporsi jumlah anggota komite audit independen dan jumlah anggota komite audit Muhammad dan Sulong dalam Petri, (2012). Tetapi tidak konsisten dengan penelitian Muhammad *et al* (2009), dan Anyta (2011) yang menunjukkan bahwa independensi komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas

pengungkapan *corporate governance* dan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).

Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan (Foker dalam Anggraini *et.al*, 2009). Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Independensi Komite Audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan *corporate governance*

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*

Menurut Cowen *et al* dalam Sembiring, (2005) secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan, dan perusahaan yang lebih besar dengan aktivitas operasi dan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat mungkin akan memiliki pemegang saham yang memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas. Perusahaan yang lebih besar akan lebih banyak disoroti oleh para pemegang saham.

Penelitian yang dilakukan Rianto dan Surya (2013) bertujuan untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* terhadap perusahaan. Populasi penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar BEI pada tahun 2008 sampai dengan 2011. Variabel yang digunakan sebagai variabel independen adalah variabel ukuran perusahaan,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kualitas audit tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate governance*, sedangkan variabel kepemilikan dispersi dan ukuran dewan komisaris berpengaruh secara positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate governance*. Hasil penelitian ini di dukung oleh Anggraini (2006), dan Petri (2012). Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka perusahaan itu akan semakin besar pula keterkaitannya dengan *shareholders*, sehingga perusahaan perlu untuk menyediakan pengungkapan *corporate governance* sehingga dapat memberikan informasi yang diperlukan para *shareholders*.

Berdasarkan penelitian teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*

4. Pengaruh profitabilitas terhadap luas pengungkapan *corporate governance*

Profitabilitas menggambarkan kinerja perusahaan atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Muhamad *et al* dalam Riyanto dan Surya, (2013) menyatakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi lebih cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi dimana informasi ini digunakan untuk mendukung kelangsungan posisi perusahaan tersebut. Pada praktiknya, peningkatan jumlah dan ragam pemangku harus disertai dengan pengungkapan informasi, khususnya informasi mengenai *Corporate Governance*

sebagai respon tanggap jawab atas penggunaan dana pemangku kepentingan oleh

perusahaan (Pramono,2011). Dengan laporan informasi *Corporate Governance* yang memiliki kualitas yang tinggi, maka pemangku kepentingan akan semakin yakin dengan cara yang ditempuh oleh manajemen. Cara-cara yang dimaksud adalah cara-cara yang memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan, tidak hanya berdasarkan kepentingan perusahaan saja.

Penelitian Rianto dan Surya (2013) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*, dan penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Benardi, dkk (2009) penelitian Anggraini (2006) dan Kusumawati (2007). Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian Aljifri dan Hussainey (2006) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Dengan demikian, kenaikan profitabilitas akan menyebabkan kecenderungan kenaikan tingkat pengungkapan laporan informasi *Corporate Governance*. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu hipotesis yang keempat dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₄: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*

5. Pengaruh kepemilikan dispersi terhadap luas pengungkapan *corporate governance*

Kepemilikan dispersi diartikan sebagai kepemilikan saham yang tersebar oleh banyak investor. Masing- masing investor memiliki kebutuhan mengenai informasi perusahaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, semakin

pengungkapan mengenai *corporate governance* yang diungkapkan. Untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan akan informasi, khususnya informasi *corporate governance*, perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi *corporate governance* lebih luas.

Naim dan Rakhman dan Rini (2010) mengatakan bahwa jika kepemilikan manajerial semakin besar, maka akan semakin sedikit informasi yang akan diungkapkan dalam laporan tahunan karena manajer memiliki akses yang luas terhadap informasi perusahaan tanpa harus melalui laporan tahunan yang dipublikasikan. Sebaliknya, semakin banyak saham yang dimiliki oleh investor individu, maka akan semakin banyak informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan. Karena investor ingin memperoleh informasi seluas-luasnya tentang perusahaan tempat ia berinvestasi serta dapat mengawasi manajemen.

Penelitian yang dilakukan yang dilakukan Rini (2010) bertujuan untuk mengetahui analisis luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan. Data yang digunakan diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2007 dan 2008. Rini (2010) menyimpulkan bahwa besaran perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Akan tetapi, umur *listing* perusahaan, kepemilikan dispersi, perusahaan multinasional, dan ukuran dewan komisaris tidak menunjukkan pengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Rianto dan Surya (2013), Hikmah, dkk, (2011) yang menunjukkan bahwa kepemilikan dispersi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati (2007) yang menyatakan bahwa kepemilikan dispersi memiliki pengaruh yang kecil terhadap tingkat pengungkapan *corporate governance*. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis kelima dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₅ : Kepemilikan dispersi memiliki pengaruh yang kecil terhadap tingkat pengungkapan *corporate governance*.

D. Model Penelitian

Variabel independen

Ukuran Dewan Komisaris

Independensi Komite Audit

Ukuran Perusahaan

Variabel Dependen

Luas pengungkapan
corporate governance